

**INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA
(Studi Tentang Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut
Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

BERZSA NOVA KURNIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

INNOVATION OF LOCAL GOVERNMENT'S POLICY IN IMPROVING VILLAGE ECONOMY

**(Study About The Program of Advanced Village Andan Jejama The
Prosperous Village Participation Movement (GaDIS) in 2017 on Pesawaran
District)**

By

BERZSA NOVA KURNIA

The latest data from the Central Bureau of Statistics in December 2015 shows that Pesawaran District is in the top three position, amounting to 17.51% in the category of the poorest districts in Lampung Province. Local Government of Pesawaran District makes a policy innovation to improve the village economy through the program of advanced village Andan Jejama the prosperous village participation movement (GaDIS) with the aim that the village be independent and resilient according to one of the Pesawaran District missions in terms of poverty alleviation. This research aims to describe and analyze innovations as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of the GaDIS Program innovation in Hanura Village and Sidodadi Village, Pesawaran District, which received the grant in 2017. The techniques of data collection carried out are by interviews, documentation, and observation.

The results shows that the innovation of GaDIS program di Pesawaran district fulfills the aspects of relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. GaDIS program is supported by the existence of good coordination between the Regional Government, stakeholders and the society. This innovation is also supported by the freedom of expression, this innovation has support by the whole community. Pesawaran District Government allocates adequate budget from the Revenue Budget and Regional Expenditure (APBD) of Pesawaran Regency. The inhibiting factor in the innovation of the GaDIS program is the incomplete administration & SOP of each business unit in Hanura and Sidodadi Villages, poor business management, and the reluctance of BUMDes and Village Apparatus to stop the vacuum and loss business units.

Keywords : Innovation, Policy, Economy, and Local Government.

ABSTRAK

INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA (Studi Tentang Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran)

Oleh

BERZSA NOVA KURNIA

Data terakhir Badan Pusat Statistik per Desember 2015, menempatkan Kabupaten Pesawaran berada pada posisi tiga teratas yaitu sebesar 17,51% dalam kategori Kabupaten termiskin di Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran membuat suatu inovasi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) dengan tujuan agar desa menjadi mandiri dan tangguh sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Pesawaran dalam hal pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan inovasi Program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi Kabupaten Pesawaran yang mendapatkan dana bantuan tersebut di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program GaDIS di Kabupaten Pesawaran memenuhi aspek keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemampuan diamati. Program GaDIS didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, *stakeholder* dan masyarakat, inovasi ini juga didukung oleh adanya kebebasan berekspresi, inovasi ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan anggaran yang memadai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran. Faktor penghambat dalam inovasi program GaDIS ini adalah belum lengkapnya administrasi & SOP per unit usaha di Desa Hanura dan Desa Sidodadi, manajemen usaha yang buruk, dan masih enggan nya pihak BUMDes dan Aparatur Desa dalam menghentikan unit usaha yang vakum dan merugi.

Kata kunci : Inovasi, Kebijakan, Ekonomi, dan Pemerintah Daerah.

**INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA
(Studi Tentang Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut
Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

BERZSA NOVA KURNIA

(Skripsi)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK

pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DESA**
(Studi Tentang Program Desa Maju Andan Jejama
Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017
di Kabupaten Pesawaran)

Nama Mahasiswa : *Berzsa Nova Kurnia*


No. Pokok Mahasiswa : 1516041081

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP 19690815 199703 2 001


Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.
NIP 19850620 200812 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



Sekretaris : **Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.**



Penguji Utama : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 9590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 25 April 2019
Yang membuat pernyataan,



Berzsa Nova Kurnia
NPM. 1516041081

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Berzsa Nova Kurnia, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 November 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ketut Swardhana dan Ibu Napsah, S.Pd. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Kartika II-28 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-25 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di RSBI SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2018, penulis melaksanakan KKN di Desa Way Rilau, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari. Kegiatan KKN ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis tentang fenomena empiris di lapangan berkaitan dengan bidang ilmu penulis. Selama menjadi mahasiswa,

penulis pernah mengikuti Organisasi Intra Kampus, yaitu Organisasi Himpunan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himagara) sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat (MIKAT). Organisasi yang penulis ikuti tersebut telah mengembangkan karakter dan kepribadian penulis selama menjadi mahasiswa, hingga sampai sekarang ini. Penulis yakin organisasi yang penulis ikuti tersebut akan bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

MOTTO

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan/nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Qs. Ar-Raad:11)

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.”

(Qs. Ar-Rad : 28)

“The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.”

(Berzsa Nova Kurnia)

PERSEMBAHAN



Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah SWT, karena telah memberikan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak,

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Mama dan Papa Tercinta

Kakaku dan Abangku Tersayang

Keponakanku Tersayang

Terima kasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang dan segala doa untukku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta...

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Studi Tentang Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Kedua orangtuaku, Ayahanda I Ketut Swardhana dan Ibunda Napsah, S.Pd..
Terima kasih atas kasih sayang yang telah Mama dan Papa berikan kepadaku, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AP ini aku bisa dengan segera mendapatkan pekerjaan yang dapat

meningkatkan derajat kedua orangtua dan keluarga agar mampu membahagiakan Mama dan Papa, Aamiin.

2. Kakak dan Abangku, Merlinda Susanti, S.Sos dan Ade Saputra Yusuf, S.Kom. yang selalu mendukung dedek dalam hal apapun itu, yang selalu memberikan hiburan dan asupan-asupan cemilan ketika dedek sedang pusing skripsi sehingga pipiku makin mengembang. Kita semua harus bisa jadi anak kebanggaan Mama dan Papa, selalu membahagiakan mereka berdua, dan harus jadi adik kakak yang selalu mendukung satu sama lain, doakan dedek agar bisa menjadi orang yang sukses dalam meniti karir dan rumah tangga kelak. Aamiin.
3. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih ibu atas bimbingan dan motivasi serta masukannya yang banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Terimakasih karena ibu tidak pernah mempersulit saya dalam bimbingan skripsi. You are the best lecture for me. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
4. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih ibu untuk segala masukan, saran, dan dukungan yang diberikan, serta waktu untuk bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ibu adalah seseorang yang sangat menginspirasi saya untuk melanjutkan studi S2 dan S3 dalam usia

muda. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

5. Bapak Nana Mulyana, S.IP, M.Si selaku dosen pembahas. Terimakasih atas segala kritik, saran dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terlihat lebih baik lagi.
6. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih pak atas nasehat, arahan, motivasi dan ilmu yang diberikan selama proses pendidikan hingga saat ini.
7. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Selvi Diana Melinda, S.AN., M.PA yang telah memberikan saran dan arahan-arahan positif dari saat sebelum penulis mengajukan judul skripsi hingga saat ini.
9. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Ibu Ita, Ibu Devi, Ibu Dewi, Ibu Rahayu, Ibu Novita, Prof Yulianto, Pak Bambang, Pak Syamsul, Pak Simon, Pak Dedy, dan Ibu Anisa, terimakasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Pak Azhari dan Pak Jo selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.
11. Segenap informan penelitian di Dinas PMD Kabupaten Pesawaran, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. M. Zuriadi, M.H (Kepala Dinas PMD Pesawaran) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas PMD, Bapak Jenny Ricardo Freitas B.,

S.STP., M.A (Kabid Keuangan, Aset, dan Pembangunan Desa), Bapak Rendy Ahades Dwi Putra, S.E., M.M. (Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan), dan terkhusus Kak Eko Maristiyawan, S.IP., M.IP (Kasi Pembinaan Kemasyarakatan) yang sangat ramah dan baik hati, selalu memberikan informasi secara jelas dan lengkap, serta memberikan motivasi, terimakasih kak sudah banyak membantu Berzsa dalam segala hal, semoga amal kebaikan kakak dan teman-teman kakak dilipatgandakan oleh Allah swt. Aamiin. Terimakasih juga kepada Bapak (Sekertaris Camat Teluk Pandan), Bapak Yudi (Sekdes Hanura), Bapak Iwan (Sekdes Sidodadi), Bapak Rusmin (Ketua Bumdes Karya Maju Desa Sidodadi), Bapak (Ketua Bumdes Hati Nurani Desa Hanura), serta beberapa kelompok unit usaha di Desa Hanura dan Sidodadi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada sahabatku dari SMP, SMK, dan kuliah walaupun sekarang beda jurusan dan fakultas yang sudah kuanggap saudara sendiri, Fajria Eka Safitri yang selalu mengingatkan kebaikan dan urusan akhirat, selalu memberikan motivasi dan informasi-informasi penting, yang paling bisa mengerti keadaanku dalam kondisi apapun, selalu bisa menjadi pendengar dan pemberi saran terbaik. Semoga kita selalu menjadi sahabat di dunia maupun di akhirat kelak yaa Aamiin.
13. Terimakasih kepada para sahabat bitjhesku yaitu Bestha Lady (orang yang selalu siap siaga menemaniku dalam urusan perkuliahan dan non

perkuliahan, dan senasib sepenanggungan hehe), Kartika Marini (orang yang selalu menghibur, banyak gebetannya cuy, enak diajak curhat dan dimintain pendapat), serta Regita Putri Melinda (orang yang kalo poto harus berkali-kali, tapi yang dipilih cuma 1 huhu, manusia royal walaupun sering ngeselin apalagi kalo udah ngasih kucing hmm). I hope we can be bestfriend forever guys. Hope we can be successfull people.

14. Terimakasih kepada sahabatku, Onisa Nainggolan teman dari SMK walaupun beda jurusan yang selalu menghibur (bener-bener gokils dan gila), temanku dikala riset, terimakasih eoni Korea ku satu pesanku untukmu : selalu on time ya di setiap situasi apapun. Dewi Pratiwi teman SMK yang beda jurusan, teman tebenganku, teman jajan kemana-mana, banyak gebetannya tapi tetep dodo yang ada di hati dan pikirannya hmm, di depan selalu ceria tapi di dalam hati mah menangis HAHA, thanks wik atas semua bantuannya dari awal kuliah sampe sekarang, satu pesanku untukmu : jangan terlalu sering begadang dan minum kopi gak baik untuk kesehatan. Meika Permatasari yang baik hati dan tidak sombong, thanks meii sudah sering membantuku dalam perkuliahan, satu pesanku untukmu jangan childish yaa jangan keseringan ngambek dah tua haha. Pradita Irwandari, teman seperbimbinganku dan Elva Rahman, sahabatku dari awal kuliah till now, terimakasih ya dit dan mak elva atas bantuan, doa dan support kalian selama ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses yaa Aamiin.
15. Sahabatku yang selalu memberikan *support*, doa, cemilan, nasihat dll. Terimakasih kepada Tazakka, Rian, Tiko dan Rizal atas semua perhatian-

perhatian dan nasehat yang pernah diberikan. Sukses selalu untuk kalian semua.

16. Terimakasih kepada teman-teman KKN ku Way Rilau Squad sudah menjadi keluarga keduaku selama 40 hari di Way Rilau, Cukuh Balak. Thanks to Afa (temen sepergunjangan, temen pulang, temen curhat, dll), Bang Hayu (peringat akhirat, idaman wanita desa wkwk, dan mas comblangku), Bang Riki (kordesku, pria kreatif, dan setia), Bang Topper (playboy, ngeselin, tukang abisin makanan, but paling perhatian sama gue hehe), Vita (teman sefakultasku, keibuan, lincah), dan Kak Zaki (si kecil yang memiliki pengetahuan banyak tentang hama tanaman, idaman bapak-bapak desa wkwk). Terimakasih karena sudah membantuku dalam segala hal, sudah merawat dan menghiburku ketika ku sedang sakit dan kangen rumah, serta telah menjadi tim yang solid dan kompak.
17. Terimakasih kepada moderator dan mahasiswa pembahas skripsi ku dari seminar proposal hingga seminar hasil karena telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengoreksi skripsi ku (Bestha, Kartika, Meika, Ria, dan Bang Leo).
18. Seluruh teman-teman Atlantik (Angkatan 17 Administrasi Publik), Annisa Hidayati, Vera, Tala, Anggi, Ria, Rika, Dedi, Cindy, Ana, Nisa, Iyan, Nurma, Anggita, Yuan, dll., maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita semua sukses, Amin.
19. Terimakasih kepada kakak tingkat ku, Kak Yumas, Bang Tengku, Bang Leo, Mba Anggi, Mba Andra, dan seluruh angkatan 014 dan 013 serta adik-

adik tingkatku 016 dan 017, terimakasih atas bantuan ilmu dan pengalaman yang berarti selama perkuliahan.

20. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya.

Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandarlampung, 25 April 2019

Penulis

Berzsa Nova Kurnia

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Inovasi Kebijakan	
1. Inovasi	
1.1 Pengertian Inovasi.....	14
1.2 Karakteristik Inovasi	17
1.3 Faktor Pendukung Inovasi	18
1.4 Faktor Penghambat Inovasi.....	18
1.5 Inovasi di Pemerintahan Daerah	21
2. Kebijakan	
2.1 Pengertian Kebijakan	22
3. Inovasi Kebijakan.....	27

C.	Tinjauan Program.....	29
D.	Tinjauan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS)	31
E.	Kerangka Pikir	38

III. METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan dan Tipe Penelitian	39
B.	Fokus Penelitian.....	40
C.	Lokasi Penelitian.....	41
D.	Sumber Data.....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
F.	Teknik Analisis Data.....	47
G.	Teknik Keabsahan Data	50

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran	53
	1. Gambaran Umum Desa Hanura	55
	2. Gambaran Umum Desa Sidodadi.....	59
	3. Gambaran Umum Dinas PMD Pesawaran	63
B.	Hasil	
	1. Prinsip-prinsip Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017 di Desa Hanura dan Desa Sidodadi	65
	2. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Program GaDIS dengan menggunakan karakteristik inovasi	83
	3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi tahun 2017	
	3.1 Faktor-Faktor Pendukung Inovasi	92
	3.2 Faktor-Faktor Penghambat Inovasi.....	97
C.	Pembahasan	
	1. Prinsip-prinsip Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017 di Desa Hanura dan Desa Sidodadi	105
	2. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Program GaDIS dengan menggunakan karakteristik inovasi	125

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi tahun 2017	
3.1 Faktor-Faktor Pendukung Inovasi	141
3.2 Faktor-Faktor Penghambat Inovasi.....	145

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	151
B. Saran	153

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Desa Penerima Bantuan Program GaDIS Tahun 2017.....	8
2.	Penelitian Terdahulu	12
3.	Daftar Informan	43
4.	Daftar Observasi	46
5.	Daftar Dokumen	47
6.	Urutan Jabatan Kepala Desa Hanura	56
7.	Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga	57
8.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	58
9.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
10.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Hanura.....	59
11.	Urutan Jabatan Kepala Desa Sidodadi.....	60
12.	Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga	61
13.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	61
14.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
15.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidodadi	62
16.	Matriks Prinsip-Prinsip Program GaDIS Tahun 2017 di Desa Hanura dan Desa Sidodadi Matriks Prinsip-Prinsip Program GaDIS Tahun 2017 di Desa Hanura dan Desa Sidodadi	124
17.	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Program GaDIS dengan Menggunakan Karakteristik Inovasi.....	139
18.	Matriks Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program GaDIS Tahun 2017	149

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.	Model Kerangka Pemikiran.....	38
2.	Analisis Data Model Interaktif	50
3.	Unit Kegiatan Usaha Tas Rajut	65
4.	Unit Kegiatan Usaha Tanaman Hidroponik	67
5.	Unit Kegiatan Usaha Ikan Hias	67
6.	Unit Kegiatan Usaha Pembuatan Miniatur Kapal	68
7.	Unit Kegiatan Usaha Sanggar Seni Budaya	69
8.	Unit Kegiatan Usaha Pembiayaan Pemasaran Produk	69
9.	Unit Kegiatan Usaha Keripik Pisang Aneka Rasa.....	70
10.	Unit Kegiatan Usaha Keripik Tempe	70
11.	Unit Kegiatan Usaha Pandu Wisata.....	71
12.	Unit Kegiatan Usaha Budidaya Kambing.....	72
13.	Unit Kegiatan Usaha Budidaya Jamur Tiram.....	73
14.	Unit Kegiatan Usaha Bank Sampah	73
15.	<i>Roadmap</i> Prinsip Inisiatif	111
16.	<i>Roadmap</i> Prinsip Partisipatif	114
17.	<i>Roadmap</i> Prinsip Demokratis	117
18.	<i>Roadmap</i> Prinsip Manfaat	119
19.	<i>Roadmap</i> Prinsip Gotong Royong.....	121
20.	<i>Roadmap</i> Prinsip Berkelanjutan	123
21.	<i>Roadmap</i> Karakteristik Keunggulan Relatif.....	130
22.	<i>Roadmap</i> Karakteristik Kompatibilitas	132
23.	<i>Roadmap</i> Karakteristik Kerumitan	134
24.	<i>Roadmap</i> Karakteristik Kemampuan diujicobakan.....	136
25.	<i>Roadmap</i> Karakteristik Kemampuan diamati.....	138

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa saat ini masih dianggap belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun desa memiliki peranan penting terhadap kemajuan kota, akan tetapi desa masih dipandang rendah dalam hal pembangunan ekonomi, padahal kita ketahui sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, hal itu juga yang harus menjadi perhatian besar dari pemerintah pusat maupun daerah. Kemajuan dalam bidang ekonomi sebagai titik fokus pembangunan memiliki hubungan keterkaitan antara pemerintah pusat dengan dukungan iklim perekonomian yang baik pada tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi, kemajuan ekonomi dapat tercapai apabila kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik, begitupun seterusnya, kemajuan ekonomi pada kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai Desember 2015 tercatat ada 28,28 juta orang (11,25%). Lebih lanjut berdasarkan peta konsentrasi daerah tertinggal, provinsi Lampung masih dikategorikan daerah miskin dan menduduki peringkat keempat sebagai daerah termiskin di Sumatera. Angka kemiskinan di

Lampung sampai akhir Desember 2015 mencapai 13,53% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 62.810 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi sebesar 5,79% per tahun. Data terakhir BPS per Desember 2015 diketahui Kabupaten termiskin di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Utara dengan 23%, diikuti dengan Kabupaten Pesawaran dengan 17,51% dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan 10,32%. Perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan karena 15,05% penduduknya masuk dalam kategori miskin. Bertolak dari data-data tersebut dapat diasumsikan bahwa perdesaan memberikan kontribusi tertinggi dalam persentase kemiskinan di Provinsi Lampung.¹

Tingginya jumlah penduduk miskin pada perdesaan di Provinsi Lampung membuat Pemerintah Provinsi Lampung semakin fokus dan terus bergerak dalam menanggulangi kemiskinan secara komprehensif dan terpadu dengan berbagai program berbasis pedesaan. Sejak terjadinya pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam berinovasi mengurus pembangunan di daerahnya masing-masing. Menurut Kim, dalam inovasi pemerintah daerah, tidak boleh bermain dalam inovasi yang sama dengan daerah lain (Noor, 2017 : 112). Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dirinya, khususnya berkenaan dengan peningkatan pelayanan publik. Terlebih dengan keluarnya PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan untuk memahami hal ini.

¹ *Bappenas.go.id*. Diakses pada 20 Agustus 2018.

Contoh Pemerintah Daerah yang telah berhasil membuat suatu inovasi ialah Pemerintah Provinsi Lampung yang menggagas Inovasi Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). Program yang dimulai sejak tahun 2015 ini merupakan salah satu program unggulan di Provinsi Lampung dalam rangka membangun desa dengan tujuan mengentaskan desa tertinggal. Program ini dilakukan melalui pemberian Bantuan Dana Langsung masyarakat yang dikemas dalam bantuan dana provinsi sebagai stimulant kepada masyarakat desa di lokasi desa-desa tertinggal untuk pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat (Sumber : <http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-program-gerbang-desasaburai-terus-entaskan-desa-tertinggal-di-lampung.html> Diakses pada 01 Desember 2018. Pukul 21.45 WIB). Inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Gerbang Desa Saburai merupakan suatu inovasi yang fokus pada pembangunan infrastruktur desa-desa tertinggal di Provinsi Lampung yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian bagi masyarakat yang ada di desa.

Contoh inovasi lainnya yaitu Pemerintah Provinsi Bali. Inovasi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu program inovasi desa berbasis *digital*. Program desa berbasis digital di Bali ini merupakan langkah maju bagi Bali agar desa-desa yang ada di Bali bisa mempromosikan dan menawarkan potensi desanya untuk kemajuan pembangunan desanya. Program inovasi berbasis *digital* merupakan kesempatan emas bagi peningkatan kesejahteraan desa, sebab desa bisa menampilkan potensinya secara *digital* sehingga bisa menarik kesempatan ekonomi yang lebih besar (Sumber : <http://theeast.co.id/> Diakses pada 01 April

2018. Pukul 20.05 WIB). Jika melihat contoh inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali, membuktikan bahwa pembangunan pedesaan melalui program inovasi desa berbasis digital merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Bali dengan cara mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa, yang lebih menekankan pada inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan (*transfer knowledge*).

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa sehingga akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Sebagai bagian dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut memberikan wewenang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sumber pendapatan desa selama ini sebagian besar hanya berasal dari bantuan pemerintah pusat dan daerah sehingga desa tidak dapat mengandalkan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan desa baik dari segi infrastruktur maupun dari segi administratif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat suatu kebijakan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengelolaan potensi desa. Pendirian BUMDes didasarkan pada

prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.

Tidak hanya di Provinsi Lampung dan Bali saja yang membuat suatu inovasi untuk meningkatkan perekonomian desa di daerahnya. Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung pun tepatnya di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Daerah setempat juga membuat sebuah inovasi yang ditujukan untuk desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat desa sekaligus untuk memperkuat BumDes. Sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Pesawaran yaitu Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri, maka Pemerintah Daerah Pesawaran membuat suatu inovasi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian desa agar desa menjadi mandiri yaitu melalui Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS).

Menurut Eko Maristiyawan, S.IP., M.IP selaku Kasi Pembinaan Kemasyarakatan Dinas PMD Pesawaran menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Konteks pemberdayaan masyarakat desa lah yang dijadikan prioritas penting oleh Pemerintah Daerah Pesawaran untuk memajukan pembangunan desa-desa yang ada di Kabupaten Pesawaran. Program GaDIS ini mengingatkan dan menyadarkan desa bahwa desa memiliki alat untuk membangun potensi-potensi yang ada di dalamnya. Pemerintah Daerah Pesawaran berusaha untuk membuat desa-desa menjadi mandiri dengan memanfaatkan potensi-potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika suatu saat nanti Pemerintah Pusat tidak mengalokasikan bantuan keuangan lagi kepada desa-desa dalam bentuk dana desa.” (Pra Riset, 06 September 2018)

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai Kabupaten yang terbilang baru terbentuk, Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari 144 desa. Saat ini seluruh desa di Kabupaten Pesawaran telah membentuk BUMDes. Pergerakan ekonomi desa melalui BUMDes bukan saja memberikan peluang efek positif bagi Pendapatan Asli Desa namun juga memberikan efek domino berupa tumbuhnya inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Oleh karena itu, bagi desa yang mampu mengelola BUMDes-nya dengan baik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan memberikan penghargaan "*BUMDes Award*". Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah dengan memberikan penghargaan bagi desa yang secara kepatuhan telah menjadi desa yang baik dalam merealisasikan pajak PBB yang akan direalisasikan berupa bantuan stimulus keuangan ke BUMDes melalui program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) (Sumber : <https://www.radarlamsel.com> Diakses pada 22 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB).

Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran nomor 49 tahun 2017, GaDIS merupakan program pemberian bantuan keuangan untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi ekonomi kreatif dan inovasi desa demi kemajuan desa dan terciptanya lapangan kerja. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa untuk mendapatkan program GaDIS, diantaranya : Tertib Administrasi Desa, Lunas PBB, berjalannya

Siskamling, Inovasi PKK, dan yang paling utama ialah adanya Dokumen Perencanaan Usaha BUMDes. Sebagai program yang ditekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana GaDIS yang berjumlah Rp100 juta untuk setiap Desa tersebut merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagi desa yang telah memperoleh bantuan keuangan GaDIS tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut dari program ini (Sumber : <https://www.radarlamsel.com> Diakses pada 22 Agustus 2018, pukul 21.30 WIB).

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Jenny Ricardo Freitas Belo, S.STP., M.A. selaku Kabid Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa Dinas PMD Pesawaran menyatakan bahwa :

“Dalam aplikasinya, dana GaDIS diberikan secara tunai, untuk membiayai operasional desa yang ditunjuk. Setelah dana GaDIS ditransfer ke rekening desa, maka desa harus segera mentransfernya ke rekening BUMDes untuk selanjutnya pengurus BUMDes yang akan mengelolanya sesuai dengan unit usaha yang diusulkan kepada Tim Koordinasi GaDIS. Program GaDIS tersebut hanya sekali diberikan, lalu selanjutnya desa tersebut harus dapat mandiri.” (Pra Riset, 06 September 2018)

Adapun desa-desa yang telah mendapatkan bantuan dana dari Program GaDIS diantaranya :

**Tabel 1.1 Data Desa Penerima Bantuan Keuangan Program Gerakan Desa
Ikut Sejahtera (GaDIS) Kabupaten Pesawaran Tahun 2017**

No	Kecamatan	Desa/Ranking	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Way Lima	1. Padang Manis 2. Cimanuk 3. Kuta Dalam 4. Pekon Doh	Rp 100.000.000,-/ desa
2	Punduh Pedada	1. Bawang 2. Bangunrejo 3. Banding Agung 4. Kota Jawa	Rp 100.000.000,-/ desa
3	Way Ratai	1. Mulyosari 2. Gunung Rejo 3. Ceringin Asri 4. Wates Way Ratai	Rp 100.000.000,-/ desa
4	Kedondong	1. Kedondong 2. Tempelrejo 3. Pesawaran 4. Kertasana	Rp 100.000.000,-/ desa
5	Gedong Tataan	1. Bogorojo 2. Taman Sari 3. Kebagusan 4. Gedong Tataan	Rp 100.000.000,-/ desa
6	Padang Cermin	1. Banjaran 2. Hanau Berak 3. Gayau 4. Trimulyo	Rp 100.000.000,-/ desa
7	Marga Punduh	1. Sukajaya Punduh 2. Pekon Ampai 3. Umbul Limus 4. Kunyaian	Rp 100.000.000,-/ desa
8	Negeri Katon	1. Sinar Bandung 2. Ponco Kresno 3. Karang Rejo 4. Purwo Rejo	Rp 100.000.000,-/ desa
9	Way Khilau	1. Kubu Batu 2. Penengahan 3. Padang Cermin 4. Sukajaya	Rp 100.000.000,-/ desa
10	Teluk Pandan	1. Hanura 2. Tanjung Agung 3. Hurun 4. Sidodadi	Rp 100.000.000,-/ desa
11	Tegineneng	1. Bumi Agung 2. Margo Mulyo 3. Sinar Jati 4. Negara Ratu Wates	Rp 100.000.000,-/ desa

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran, 2017.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 ada 11 kecamatan yang terdiri dari 44 desa yang telah berhasil mendapatkan dana bantuan dari program GaDIS. Desa-desa tersebut merupakan desa yang menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan lolos administrasi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Masing-masing desa yang ada di 11 kecamatan tersebut mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 100 juta. Berdasarkan data-data diatas, peneliti mengambil dua sampel desa yang ada di Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran yang telah mendapatkan bantuan dana dari program tersebut untuk melihat bagaimana pelaksanaan program GaDIS. Apakah program ini merupakan suatu inovasi yang benar-benar dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian desa, atau justru hanya akan menghabiskan dana APBD Kabupaten Pesawaran saja. Suatu inovasi dengan sifat kebaruannya tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya karena jika dilihat Program GaDIS merupakan satu-satunya inovasi kebijakan bantuan keuangan yang ada di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk memperkuat sekaligus memberi ruang gerak inisiatif BUMDes, sebab biasanya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Lampung hanya berfokus pada bantuan peningkatan infrastruktur saja sehingga inovasi kebijakan ini seharusnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan nilai kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA (Studi Tentang Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana inovasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan perekonomian desa melalui Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) sebagai upaya peningkatan perekonomian desa di Kabupaten Pesawaran ?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis inovasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan perekonomian desa melalui Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) sebagai upaya peningkatan perekonomian desa di Kabupaten Pesawaran

2. Mengetahui dan menguraikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual dan manfaat praktis untuk perbaikan bagi lembaga yang bersangkutan. Manfaat penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama melaksanakan perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung dan pengembangan Ilmu Administrasi Negara umumnya.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Pesawaran dalam mengevaluasi inovasi dan memberi masukan dalam upaya memperbaiki inovasi demi terciptanya keadaan yang lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang berjalan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Ika Yulita Rumahorbo (2016)	Inovasi Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015)	Inovasi pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Bandar Lampung memenuhi aspek kemanfaatan, kesesuaian, kompleksitas, aplikasi, dan dapat diamati. Inovasi didukung oleh adanya sikap dan respon yang baik dari komisioner dan staff KPU Kota Bandar Lampung (juga PPK dan PPS) yang dan Universitas Lampung. Penghambat dalam inovasi pemutakhiran data pemilih ini adalah waktu pelaksanaan, komitmen mahasiswa, PPK dan PPS yang kurang, regulasi, persiapan data, pengetahuan dan keterampilan kerja mahasiswa, mekanisme birokrasi, cepat tanggap menangani permasalahan, dan tidak adanya analisis	Penelitian yang dilakukan oleh Ika Yulita Rumahorbo membahas mengenai suatu inovasi yang dibuat oleh salah satu instansi pemerintahan yaitu KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dengan melibatkan partisipasi dari mahasiswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu inovasi yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Pesawaran melalui program inovasi kebijakan pemberian dana 100 juta kepada

		SWOT dan uji publik sebelum inovasi dilakukan.	desa yaitu Program GaDIS yang bertujuan untuk menjadikan desa Tangguh dan Mandiri.
Lusy Dian Putri (2016)	Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengatasi Kekeringan (Studi tentang Program Pembangunan 1000 Embung Tahun 2013)	Program pembangunan 1000 embung muncul sebagai respon terhadap problem masyarakat. Proses pembangunan embung oleh Dinas Pengairan dilaksanakan melalui usulan dengan proposal. Sedangkan pengelolaan embung sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa. Efektifitas program pembangunan embung dianalisis dengan menggunakan empat indikator diantaranya keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Selain itu ditemukan faktor pendukung program meliputi dukungan APBD, dukungan Bupati dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat program terdiri atas pengadaaan lahan, pola kebiasaan tanam masyarakat dan kebiasaan masyarakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Lusy Dian Putri membahas mengenai suatu inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi permasalahan kekeringan yang ada di daerah tersebut. Sedangkan, penulis membahas mengenai inovasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pemberian alokasi dana kepada Bumdes dengan beberapa persyaratan sehingga desa dapat Mandiri dan Tangguh.
Ria Angreini (2017)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) (Studi Komparatif pada Tiyuh Penunangan	Masyarakat Tiyuh Penunangan tidak partisipatif sedangkan masyarakat Tiyuh Gunung Terang telah partisipatif yang dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam pengambilan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan	Penelitian yang dilakukan oleh Ria Angreini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam melaksanakan inovasi program yang dibuat oleh Pemprov Lampung yaitu Program Gerakan

	Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)	hasil pembangunan dari program Gerbang Desa Saburai serta menjaga keberlanjutan (sustainability) pembangunan.	Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu inovasi kebijakan melalui program inovasi kebijakan Pemda Kabupaten Pesawaran melalui pemberian dana 100 juta kepada desa yaitu Program GaDIS yang bertujuan untuk menjadikan desa Tangguh dan Mandiri.
--	---	---	--

Sumber : *Diolah oleh peneliti, 2018.*

B. Inovasi Kebijakan

1. Inovasi

1.1 Pengertian Inovasi

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Inovasi merupakan bagian integral bagi suatu organisasi, karena bukan hanya digunakan sebagai motor penggerak keberlangsungan organisasi, melainkan juga sebagai bentuk kemampuan dalam berkompetisi dengan organisasi lain. United Nations Departement of Economic And Social Affairs (2006) memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya inovasi dan eksperimen di pemerintah pusat dan daerah khususnya di bidang pelayanan dan pada saat ini berlangsung di berbagai penjuru dunia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi

administrasi publik. Pertukaran dan berbagi pengalaman inovatif ini dapat menciptakan "pengetahuan baru" yang dapat diakses oleh negara-negara di seluruh dunia (Sumber : <http://www.unpan.org/innovme>. Diakses pada 23 Agustus 2018, pukul 20.00 WIB).

Menurut Gopalakrishan dan Damanpur mengungkapkan, inovasi pada dasarnya menunjukkan pada sesuatu yang baru, apakah berbentuk gagasan-gagasan baru, produk, metode atau bentuk pelayanan (Noor, 2017:84). Sedangkan inovasi menurut Rogers (2003), inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik , jadi selain melibatkan Iptek baru, tetapi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial. Selanjutnya menurut Albury menyatakan secara sederhana bahwa inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya (Rumahorbo, 2016 : 14).

Menurut Suwarno terlepas dari perbedaan pemahaman akan inovasi tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak akan terlepas dari :

1. Pengetahuan baru

Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

2. Cara baru

Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.

3. Objek baru

Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik (berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud (intangibile).

4. Teknologi baru

Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.

5. Penemuan baru

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan (Noor, 2017 : 87).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan semua hal yang baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya baik berupa pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru maupun penemuan baru. Suatu inovasi harus memiliki manfaat karena inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

1.2 Karakteristik Inovasi

Menurut Rogers mendefinisikan beberapa karakteristik intrinsik inovasi, antara lain :

- 1) Keunggulan relatif (*relative advantage*), yaitu derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih baik/ unggul dari yang pernah ada sebelumnya.
- 2) Kompatibilitas (*compatibility*), yaitu inovasi sebaiknya mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
- 3) Kerumitan (*complexity*), yaitu derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan.
- 4) Kemampuan diuji cobakan (*trialability*), yaitu derajat dimana suatu inovasi dapat diuji-coba batas tertentu.
- 5) Kemampuan diamati (*observability*) yaitu derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain (Noor, 2017 : 92).

Inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Dalam penelitian ini, inovasi harus memenuhi ciri-ciri terhadap aspek kemanfaatan, kesesuaian, kompleksitas, aplikasi dan pengamatan inovasi tersebut. Dimensi terhadap karakteristik tersebut menjadi acuan penelitian untuk melihat terpenuhi atau tidaknya lima aspek tersebut terhadap inovasi

Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran.

1.3 Faktor Pendukung Inovasi

Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti yang dijelaskan Rogers, antara lain :

- a) Adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak tahu menjadi tahu.
- b) Adanya kebebasan untuk berekspresi
- c) Adanya pembimbing yang berawawasan luas dan kreatif
- d) Tersedianya sarana dan prasarana
- e) Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah (Rumoharbo, 2016 : 24).

1.4 Faktor Penghambat Inovasi

Menurut Albury dalam pelaksanaannya suatu inovasi tidak berjalan dengan mulus atau tanpa resistensi. Banyak kasus inovasi justru terkendala oleh beberapa faktor, seperti halnya :

- 1) Budaya yang tidak menyukai risiko (risk aversion).
- 2) Secara kelembagaan, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.
- 3) Keengganan menutup program yang gagal.

- 4) Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi adalah stagnansi dan kemacetan kerja.
- 5) Hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek
- 6) Hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel.
- 7) Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit.
- 8) Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja (Rumoharbo, 2016 : 21).

Menurut Vries, dkk (2015:149) inovasi dipengaruhi beberapa faktor yang dapat mendukung atau menjadi penghambat yang dikategorikan pada empat tingkatan, yaitu :

- 1) Tingkat lingkungan, meliputi tekanan lingkungan (misalnya perhatian media/tuntutan publik); partisipasi dalam jaringan; aspek regulasi; kompatibel lembaga/organisasi/negara mengadopsi inovasi yang sama; dan persaingan dengan organisasi lain.

- 2) Tingkat organisasi meliputi : sumber daya; gaya kepemimpinan; tingkat risiko keengganan/ruang untuk belajar; insentif/imbalan; konflik; dan struktur organisasi.
- 3) Tingkat inovasi meliputi kemudahan dalam penggunaan inovasi; keuntungan relatif; kesesuaian; dan *trialability*.
- 4) Tingkat individu/ karyawan meliputi : otonomi karyawan; posisi organisasi; pengetahuan dan keterampilan kerja terkait; kreativitas; aspek demografi; komitmen/kepuasan dengan pekerjaan; perspektif dan norma-norma bersama; inovasi penerimaan; hasil inovasi sektor publik; efektivitas; efisiensi; mitra swasta yang terlibat; warga yang terlibat; dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam melakukan inovasi banyak hambatan yang dihadapi. Beberapa penghambat tersebut antara lain yaitu :

- 1) Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal.
- 2) Sangat tergantung kepada high performers bahkan top leader sebagai sumber inovasi.
- 3) Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya inovasi.
- 4) Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi.

- 5) Lemah dalam kecakapan (skills) untuk mengelola risiko atau mengelola perubahan.
- 6) Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek.
- 7) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik vs beban tugas administratif.
- 8) Budaya cari aman, "status quo", dan takut mengambil risiko dalam birokrasi masih terlalu kuat (Sumanjoyo dan Hermawan, 2018 : 40).

Berdasarkan faktor-faktor penghambat inovasi dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan inovasi berasal dari dalam dan luar lingkungan, perencanaan inovasi itu sendiri dan para pelaksana inovasi (karyawan/pekerja).

1.5 Inovasi di Pemerintahan Daerah

Di Indonesia, pemerintahan lokal disebut juga dengan pemerintah daerah yang menurut UU Nomor 32 Pasal 1 (3) berarti bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa pemerintah daerah adalah unsur eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah (Widjaja, 2007:307).

Sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, inovasi pemerintahan daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Selain itu, kompetisi kota-kota dunia menjadi alasan pentingnya inovasi. Inovasi daerah merupakan proses meningkatkan kemampuan penciptaan nilai dan potensi pertumbuhan melalui penguatan inovatif kompetensi oleh proses kreatif daerah. Menurut Kim,

dalam inovasi pemerintah daerah tidak boleh bermain dalam inovasi yang sama dengan daerah lain. Konsepsi ini perlu dikembangkan dikarenakan :

- 1) Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dirinya, khususnya berkenaan dengan peningkatan pelayanan publik. Terlebih dengan keluarnya PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan untuk memahami hal ini.
- 2) Pemerintah daerah umumnya selalu mengikuti pola yang sama dalam menerapkan perilaku baru dalam pelayanan publik (Noor, 2017 : 112).

Dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran membuat suatu inovasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui Program GaDIS, karena mengingat desa-desa yang ada di Kabupaten Pesawaran memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah namun masyarakatnya sendiri belum mampun mengelolanya secara optimal, jika masyarakatnya dapat mengelola potensi sumber daya alam yang ada, maka bisa mendukung percepatan pembangunan perekonomian Kabupaten Pesawaran melalui pertumbuhan perekonomian desa.

2. Kebijakan

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) menurut United Nation ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. (Wahab, 2014:9). Menurut Sugandi (2011:79)

kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah, kebijakan dapat menjadi pedoman dan penentu keberhasilan suatu daerah. Oleh karena itu kebijakan daerah merupakan hal penting dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Berikut ini adalah beberapa pengertian dari kebijakan, yaitu :

- 1) Menurut Mustopadidjaja (1988) mengatakan kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan dituangkan dalam Peraturan Daerah yang mendapat persetujuan dari DPRD.
- 2) Anderson (1984) menyebutkan kebijakan sebagai tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
- 3) Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1978), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Nurcholis, 2007 : 263).

Berdasarkan ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau kegiatan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu apapun dalam memecahkan suatu permasalahan dengan pertimbangan ekonomis, sosial budaya ataupun politis.

Menurut Sugandi (2011:75-76) tujuan dari adanya kebijakan publik ini adalah membentuk keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penyeimbang maka kebijakan publik dituntut harus memberikan rasa adil bagi semuanya. Rasa adil inilah yang relatif jarang dapat diberikan di Indonesia karena rasa adil ini untuk masyarakat yang termarginal merupakan barang yang sangat mahal. Dalam pembuatan kebijakan, berbagai proses pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalam negara perlu menjadi perhatian karena pemanfaatan ini biasanya yang menjadi peran penting dalam kondisi suatu bangsa.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan publik pada masyarakat, yang oleh Ripley disebut dengan *street level bureucracy* atau birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya, diberikan kebebasan untuk mengatur, mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tuntutan menjalankan pemerintahan yang bersih semakin besar ditujukan pada pemerintah daerah, salah satu wujudnya adalah dengan menghasilkan regulasi atau kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan publik dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut (Sinaga, 2010 : 73). Pemerintah Daerah selain sebagai eksekutif yaitu pelaksana kebijakan, juga berfungsi sebagai legislatif. Berdasarkan fungsi legislatif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama-sama merumuskan APBD dan Perda.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip :

- a) Peningkatan efisiensi;
- b) Perbaikan efektivitas;
- c) Perbaikan kualitas pelayanan;
- d) Tidak ada konflik kepentingan;
- e) Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f) Dilakukan secara terbuka;
- g) Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h) Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan dari DPRD dalam bentuk peraturan daerah. Yang wajib melaksanakan perda adalah pemerintah daerah sebagai eksekutif. Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah menyusun strategi pelaksanaan kebijakan, sekretariat daerah menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok kebijakan, menyediakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Sekretaris daerah melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis. Dinas sebagai pelaksana kebijakan membuat perumusan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan perizinan dan pelayanan umum dan

melakukan monitoring terhadap tugas yang menjadi lingkup tugasnya (Nurcholis, 2007 : 268-269).

Agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka diperlukan suatu kondisi yang mendukung implementasi kebijakan. Ada beberapa kondisi yang memengaruhi kebijakan, yaitu :

- a) Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal
- b) Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup
- c) Dukungan dari berbagi sumber daya yang ada, makin banyak yang mendukung maka makin tinggi tingkat kesuksesannya
- d) Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksana kebijakan
- e) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi (Nurcholis, 2007:272).

Kelima kondisi ini sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Misalnya dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, apabila suatu kebijakan itu didukung oleh LSM, masyarakat, kelompok profesi, dan lembaga lain di luar lembaga pelaksana tentunya akan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Begitupula dengan ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun modal keuangan dan peralatan atau perlengkapan. Apabila suatu kebijakan tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten tentunya akan sulit bagi pelaksana tersebut dalam memecahkan masalah apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program GaDIS Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di tahun

2017 yang ada di dua desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

3. Inovasi Kebijakan

Inovasi berorientasi pada terobosan dan hal yang “baru”. Hal yang baru dapat dimaknai sebagai suatu hal yang benar-benar baru ditemukan, dan juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang baru bagi satu individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintahan, terlepas dari apakah inovasi tersebut sudah dilaksanakan di tempat lain atau belum. Sedangkan kebijakan dalam konteks pemerintahan menurut Thomas R. Dye lebih dimaknai sebagai suatu tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan publik untuk mencapai satu tujuan tertentu (Wahab, 2014 :14). Dari dua pemahaman inovasi dengan kebijakan, secara sederhana dapat ditarik satu pemahaman bahwa inovasi kebijakan merupakan satu kajian yang membahas mengenai apa yang baru dilakukan pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Hasil inovasi pemerintah berupa kebijakan-kebijakan publik (Putri, 2016 :15).

Inovasi kebijakan publik secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Meskipun inovasi kebijakan dilakukan tidak mengikuti tren atau secara musiman akan tetapi inovasi kebijakan dapat menjadi keputusan alternatif dalam dimensi kebijakan publik di masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Alvarez et al., (2012) *Innovation policies and innovations in public sector activities are oriented to address market failures and in particular* yang berarti inovasi kebijakan dan inovasi sektor publik berorientasi mengatasi kegagalan pasar dan seluruh bagian

yang terdapat didalamnya (Sururi, 2017:18). Kebijakan publik yang inovatif senantiasa harus: 1) Berbasis kepada kepentingan publik; 2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasinya melibatkan partisipasi publik; 3) Perumusannya senantiasa bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan aspirasi publik (Mariana, 2010:18).

Menurut Albury secara konseptual terdapat tiga jenis inovasi kebijakan yaitu :

- 1) *Policy innovation : new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.
- 2) *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan.
- 3) *Policy to foster innovation and its diffusion*. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor (Suwarno, 2008:12).

Dalam membuat suatu inovasi kebijakan, Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu program yang dapat dijalankan oleh seluruh stakeholder terkait untuk mengatasi permasalahan publik agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang membuat suatu inovasi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun

2017. Pada penelitian ini, jenis inovasi dari Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) termasuk kedalam jenis inovasi kebijakan (*policy innovations*). Inovasi kebijakan ini merupakan jenis inovasi kebijakan yang baru dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang berdasarkan pada kondisi potensi dan permasalahan yang ada di daerahnya. Dana yang dialokasikan untuk program ini pun merupakan dana yang berasal dari APBD Pesawaran sendiri.

C. Tinjauan Program

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Para peneliti dalam ilmu administrasi publik seringkali banyak terkecoh antara program dan kebijakan. Kebijakan lebih bersifat ikatan hukum terhadap berbagai program-program, sedangkan program sendiri adalah turunan dari kebijakan. Sehingga dalam konstitusi Republik Indonesia yang dinamakan dengan kebijakan memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan dengan kebijakan, dalam artian bahwa kebijakan lebih luas dibandingkan dengan program (Sugandi,2011:74). Sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu. Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones, adalah suatu komponen dalam kebijakan untuk mencapai tujuan (Aprilia, 2015 : 16).

Menurut Charles O. Jones dalam Suryana (2009 : 28), terdapat beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Menurutnya juga terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya (Suryana, 2009 : 29).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki karakteristik yaitu membutuhkan staf, memiliki anggaran sendiri serta memiliki identitas sendiri. Sebelum mengimplementasikan suatu program, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya. Program Pemerintah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran.

D. Tinjauan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS)

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Pesawaran serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Daerah Pesawaran membuat suatu visi yaitu *“Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur Dan Sejahtera”*. Visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2021 tersebut telah diselaraskan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran tahun 2005 - 2025. Kriteria capaian Visi yang diamanatkan RPJPD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011, yaitu : *”Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Sejahtera Dan Berdaya Saing Menuju Bumi Wisata 2025”* yang dicirikan dengan pengelolaan sumberdaya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah. Agar visi Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 dapat

terwujud, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran membuat 8 misi sebagai upaya untuk melaksanakan visi yang telah dibuat. Adapun Misi dari Kabupaten Pesawaran yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2016-2021, antara lain:

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terpercaya, dan Melayani.
- 2) Mewujudkan Infrastruktur Mantap dan Berkualitas
- 3) Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani
- 4) Mewujudkan Pendidikan yang Murah, Berkualitas, dan Bermartabat
- 5) Mewujudkan Petani yang Makmur dan Sejahtera.
- 6) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Kreatif
- 7) Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat
- 8) Mewujudkan Desa yang Tangguh

Ketangguhan desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena ketangguhan desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Ketangguhan desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuh kembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya. Upaya untuk mewujudkan desa yang tangguh dimaknai dengan menjamin pemerataan pembangunan di semua bidang untuk peningkatan taraf hidup masyarakat perdesaan; mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi ekonomi kreatif

demi terciptanya lapangan kerja. Oleh karena itu suatu inovasi dibutuhkan dalam pembuatan suatu kebijakan.

Langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk mencapai misi kedelapan yaitu Mewujudkan Desa yang Tangguh, yaitu dengan melakukan pemerataan pembangunan dan mengangkat potensi lokal desa melalui BUMDes. Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini seluruh desa di Kabupaten Pesawaran telah membentuk BUMDes. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus mendorong pengembangan BUMDes dengan cara membuka akses bantuan dari pemerintah pusat bagi beberapa desa yang secara kelembagaan layak untuk diberikan bantuan. Pergerakan ekonomi desa melalui BUMDes bukan saja memberikan peluang efek positif bagi Pendapatan Asli Desa namun juga memberikan efek domino berupa tumbuhnya inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.

Bagi desa yang mampu mengelola BUMDes-nya dengan baik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan memberikan penghargaan "*BUMDes Award*". Hal ini sebagai "*trial*" pemerintah desa dengan memberikan penghargaan bagi desa yang secara kepatuhan telah menjadi desa yang baik dalam merealisasikan pajak PBB yang akan direalisasikan berupa bantuan stimulus keuangan ke BUMDes melalui program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS).

Program GaDIS merupakan sebuah inovasi kebijakan pemberian *reward* atau penghargaan kepada desa yang berprestasi. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran nomor 49 tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mengeluarkan kebijakan menyalurkan anggaran melalui Program GaDIS untuk menstimulus desa lain agar bisa mencontoh keberhasilan desa yang menjadi *pilot project*. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa untuk mendapatkan program GaDIS, diantaranya :

- 1) Tertib Administrasi Desa
- 2) Lunas PBB
- 3) Berjalannya Siskamling
- 4) Inovasi PKK
- 5) Dokumen Perencanaan Usaha BUMDes.

Sebagai program yang ditekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana GaDIS yang berjumlah Rp100 juta untuk setiap desa merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun prinsip-prinsip dari bantuan keuangan GaDIS menurut Pasal 6 Perbup Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017, antara lain :

- 1) *Inisiatif*, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat desa itu sendiri.
- 2) *Partisipatif*, bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.
- 3) *Demokratis*, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama oleh masyarakat.

- 4) *Manfaat*, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- 5) *Gotong Royong*, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
- 6) *Berkelanjutan*, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Diharapkan dengan adanya program GaDIS, potensi perekonomian masyarakat desa Kabupaten Pesawaran dapat dikembangkan melalui BUMDes. Pergerakan ekonomi desa melalui BUMDes bukan saja memberikan peluang efek positif bagi Pendapatan Asli Desa namun juga efek domino berupa tumbuhnya inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Sehingga pada akhirnya Program ini dapat menjadi salah satu sebab efektif dalam rangka memberikan wahana aktualisasi desa dan masyarakat secara keseluruhan agar dapat memperoleh nilai tambah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun outcome dari adanya Program GaDIS ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 ialah Terwujudnya Desa Tangguh dan Mandiri.

E. Kerangka Pikir

Tingginya jumlah penduduk miskin pada perdesaan di Provinsi Lampung membuat Pemerintah Provinsi Lampung makin fokus dan terus bergerak dalam menanggulangi kemiskinan secara komprehensif dan terpadu dengan berbagai

program berbasis pedesaan. Sejak terjadinya pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam berinovasi mengurus pembangunan di daerahnya masing-masing. Mengacu pada Undang-Undang No. 9 tahun 2015, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk membuat kebijakan dalam rangka mengelola daerahnya. Dalam inovasi pemerintah daerah, menurut Kim yang dikutip dalam Noor (2017 : 112) tidak boleh bermain dalam inovasi yang sama dengan daerah lain. Maksudnya, dalam hal pembuatan suatu inovasi kebijakan di daerah, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan potensi dan permasalahan yang ada di daerahnya.

Berdasarkan salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yaitu Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri, maka Pemerintah Daerah Pesawaran membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan perekonomian desa agar desa menjadi mandiri melalui pengelolaan Bumdes. Wujud dari sebuah inovasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ialah dalam bentuk program. Program yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan perekonomian desa agar desa menjadi tangguh dan mandiri yaitu melalui program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS). Adapun prinsip-prinsip dari bantuan keuangan GaDIS menurut Pasal 6 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017, antara lain :

- 1) *Inisiatif*
- 2) *Partisipatif*
- 3) *Demokratis*
- 4) *Manfaat*
- 5) *Gotong Royong*

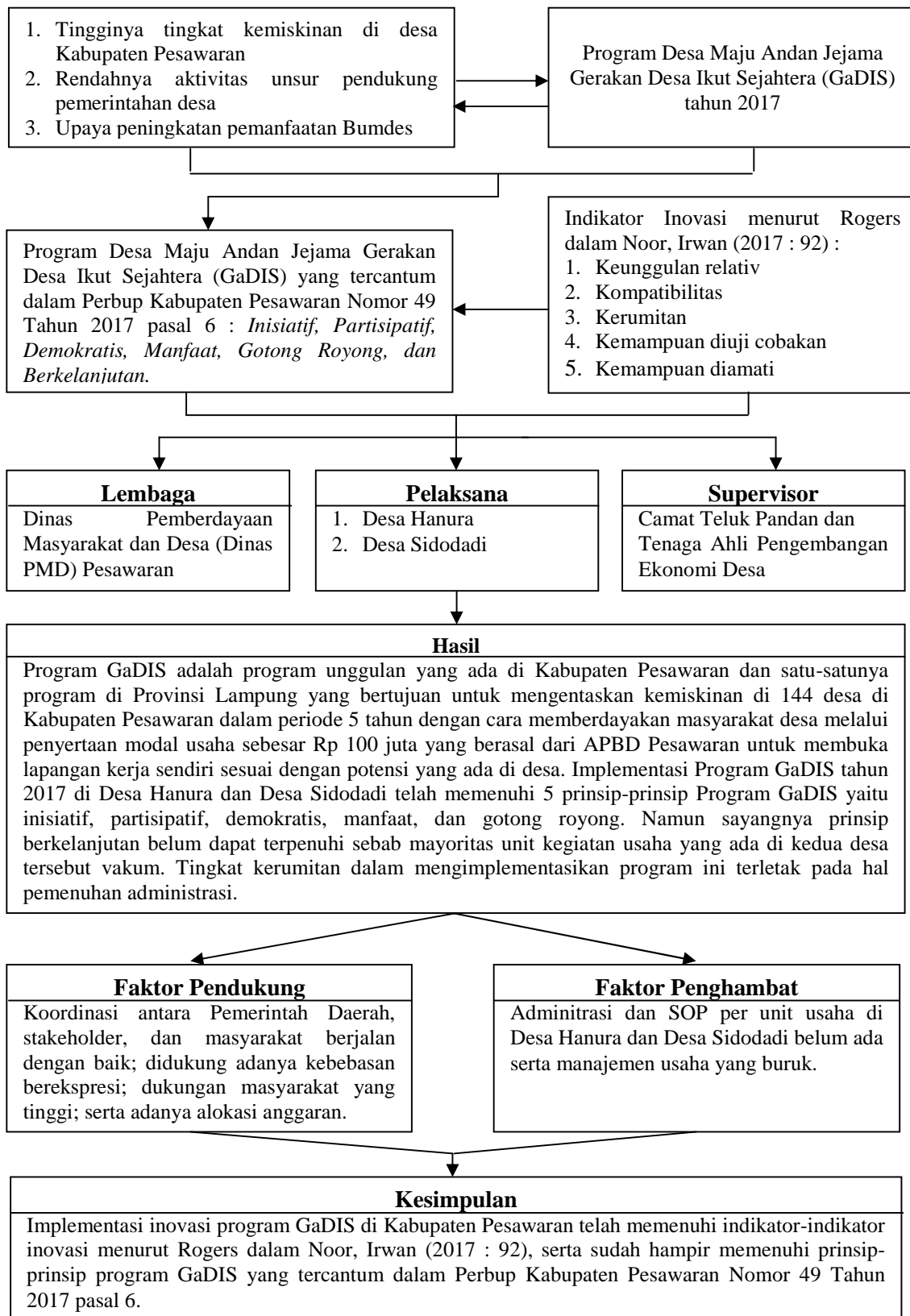
6) *Berkelanjutan*

Dengan adanya inovasi program GaDIS yang dicanangkan oleh Bupati Pesawaran ini diharapkan agar semua desa yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya karena suatu inovasi dengan sifat kebaruannya harus memiliki nilai manfaat.

Adapun karakteristik inovasi menurut Rogers yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Keunggulan relatif (*relative advantage*)
2. Kompatibilitas (*compatibility*)
3. Kerumitan (*complexity*)
4. Kemampuan diuji cobakan (*trialability*)
5. Kemampuan diamati (*observability*) (Noor, 2017 : 92).

Dari kelima karakteristik diatas, peneliti ingin mengaitkannya dengan 6 prinsip-prinsip dari bantuan keuangan GaDIS. Penelitian ini juga akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program GaDIS yang ada di Pesawaran sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dapat mengevaluasi pelaksanaan program GaDIS untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yaitu Terwujudnya Desa yang Tangguh dan Mandiri.



Sumber : *Diolah oleh Peneliti, 2019.*

Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selain itu, metode deskriptif harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah.

Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Menurut Sugiyono (2017:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan

analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Peneliti menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini dapat memberikan gambaran suatu inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan inovasi program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moleong (2017:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Inovasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian desa sesuai pasal 6 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 tentang Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun 2017 yang terdiri dari :

- 1) Inisiatif,
 - 2) Partisipatif,
 - 3) Demokratis,
 - 4) Manfaat,
 - 5) Gotong royong,
 - 6) Berkelanjutan.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip program GaDIS sesuai pasal 6 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 dengan menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers yang terdiri dari :
- 1) Keunggulan Relativ,
 - 2) Kompatibilitas,
 - 3) Kerumitan,
 - 4) Kemampuan diuji cobakan,
 - 5) Kemampuan diamati (Noor, 2017:92).

Selain itu juga dibahas mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun 2017.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penetapan penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan didalam lingkup wilayah Kabupaten Pesawaran, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai pelaksana program yang dibuat oleh Bupati Pesawaran dalam rangka meningkatkan perekonomian desa di Kabupaten Pesawaran. Selain itu lokasi penelitian yang dipilih untuk menunjang penelitian ini ialah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) Kabupaten Pesawaran, serta dua desa yang ada di Kabupaten Pesawaran yang telah mendapatkan dana bantuan dari program GaDIS tahun 2017 yaitu desa Hanura dan Sidodadi yang ada di Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran.

D. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Data Primer

Data Primer yaitu kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Contohnya seperti hasil wawancara dan observasi yang diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data mengenai pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian desa melalui Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun 2017 di Desa Hanura dan Desa Sidodadi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam

penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data-data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Desa Hanura dan Desa Sidodadi di Kabupaten Pesawaran. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 antara lain :

1. Wawancara

Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, karena biasanya pedoman tersebut telah tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan (Substansi)	Tanggal Wawancara
1	Eko Maristiyawan, S.IP., M.IP (Kasi Pembinaan Kemasyarakatan Dinas PMD Pesawaran)	Tujuan dana bantuan Program GaDIS	06 September 2018
2	Jenny Ricardo Freitas Belo, S.STP., M.A (Kabid Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa Dinas PMD Pesawaran)	Alokasi dana Program GaDIS	06 September 2018
3	Yudi Apriyanto (Sekertaris Desa Hanura)	1. Pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No.	10 Januari 2019

		<p>49 Tahun 2017</p> <p>2. Pelaksanaan prinsip-prinsip Program GaDIS dengan menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers (Noor, 2017:92)</p> <p>3. Faktor pendukung dan penghambat</p>	
4	Bapak Ahmad Khailani (Ketua BumDes Hati Nurani Desa Hanura)	Prinsip Berkelanjutan dalam pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No. 49 Tahun 2017	10 Januari 2019
5	Sukma Jaya (Sekertaris Desa Sidodadi)	<p>1. Pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No. 49 Tahun 2017</p> <p>2. Pelaksanaan prinsip-prinsip Program GaDIS dengan menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers (Noor, 2017:92)</p> <p>3. Faktor pendukung</p>	11 Januari 2019
6	Bapak Rusmin (Ketua BumDes Karya Maju Desa Sidodadi)	Prinsip Gotong Royong dalam pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No. 49 Tahun 2017	11 Januari 2019
7	Eko Maristiyawan, S.IP., M.IP (Kasi Pembinaan Kemasyarakatan Dinas PMD Pesawaran)	<p>1. Pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No. 49 Tahun 2017</p> <p>2. Pelaksanaan prinsip-prinsip Program GaDIS dengan menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers (Noor, 2017:92)</p> <p>3. Faktor pendukung dan penghambat</p>	17 Januari 2019

7	Bapak Rendy Ahades Dwi Putra, SE., MM. (Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Dinas PMD Pesawaran)	1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Program GaDIS dengan menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers (Noor, 2017:92) 2. Faktor Pendukung	17 Januari 2019
9	Ibu Fitri Puspita Sari, SE (Kaur Keuangan Desa Sidodadi)	Prinsip Berkelanjutan dalam pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No. 49 Tahun 2017	19 Januari 2019
10	Bapak Hadiwijaya (Sekertaris Camat Teluk Pandan)	1. Prinsip Manfaat dalam pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No. 49 Tahun 2017 2. Aspek Kerumitan dalam karakteristik Inovasi menurut Rogers (Noor, 2017:92)	19 Januari 2019
11	Pak Iwan (Ketua unit kegiatan usaha budidaya kambing Desa Sidodadi) dan Ibu Mursidah (Ketua unit kegiatan usaha tas rajut Desa Hanura)	Prinsip Demokratis dalam pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Perbup Pesawaran No. 49 Tahun 2017	21 Januari 2019
12	Pak Wawan (Pengelola unit kegiatan usaha tanaman hidroponik dan ikan hias Desa Hanura) dan Ibu Sumiyati (Pengelola unit kegiatan usaha jamur tiram di Desa Sidodadi)	Aspek Kerumitan dalam karakteristik Inovasi menurut Rogers (Noor, 2017:92)	21 Januari 2019
12	Ibu Wulan (Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa)	Faktor Penghambat	24 Januari 2019

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2019.

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif, yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

Tabel 3.2 Daftar Observasi yang dilakukan Peneliti

No.	Objek Peristiwa	Tempat dan Waktu Observasi
1	Pelaksanaan Unit Kegiatan Usaha Tas Rajut, Budidaya Ikan hias, tanaman hidroponik, dan pandu wisata	Unit kegiatan usaha di Desa Hanura dan tanggal 17 Januari 2019
2	Pelaksanaan Unit Kegiatan Usaha jamur tiram, bank sampah, dan budidaya kambing.	Unit kegiatan usaha di Desa Sidodadi dan tanggal 17 Januari 2019

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2019.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meng-copy data-data yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta pelaksanaan program GaDIS di Desa Hanura dan Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dokumen didapat langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Desa Hanura dan Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran.

Tabel 3.3 Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No.	Dokumen-dokumen	Substansi
1	Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 478/IV.15/HK/2017	Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017.
2	Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran.
3	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2016-2021	Visi, Misi, dan Tujuan Kabupaten Pesawaran.
4	Profil Desa Hanura	Berisi sejarah dan monografi Desa Hanura.
5	Profil Desa Sidodadi	Berisi sejarah dan monografi Desa Sidodadi.
6	Profil Dinas PMD Pesawaran	Berisi gambaran umum Dinas PMD Pesawaran.

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2019.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2017 : 248). Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hal ini dipilih karena melalui

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi peneliti dapat melihat secara lebih lengkap dan terinci terkait inovasi dilakukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data, peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

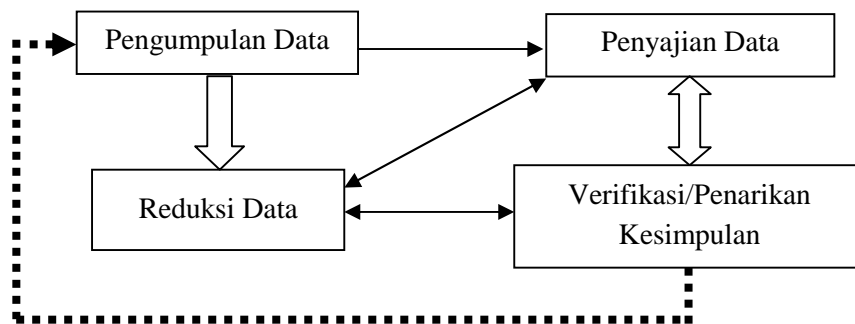
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman, melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan jenuh. Berikut adalah bagan penjelasan analisis data model interaktif yang digunakan dalam penelitian ini :



Sumber : Miles dan Huberman dikutip oleh Moleong (2017: 73)

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan peneliti mulai dari ketika peneliti menemukan data pertama ketika pra-riset sampai akhirnya peneliti berulang kali mengumpulkan data dan menyelesaikan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang valid (Moleong, 2017:73).

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk dapat menetapkan apakah data yang digunakan *valid* maka diperlukan teknik pemeriksaan atau keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Uji Kredibilitas

Penjaminan keabsahan data melalui uji kredibilitas dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, namun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber.

b) Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial dalam penelitian ini ialah rekaman hasil wawancara oleh beberapa informan di Dinas PMD Pesawaran, Desa Hanura dan Desa Sidodadi, terdapat foto dan catatan lapangan selama melakukan observasi terkait pengimplementasian Program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi, serta beberapa literatur buku yang telah disebutkan di daftar pustaka.

2. Pengujian Keteralihan (*transferability*)

Peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil dokumentasi maupun observasi secara transparan dan menguraikan secara rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian secara

dan seteliti mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Pemaparan ini dirincikan pada bab hasil dan pembahasan. Pemaparan secara keseluruhan data dilakukan agar pembaca dapat benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian.

3. Pengujian Kebergantungan (*dependability*)

Menguji kebergantungan data peneliti dilakukan untuk mengetahui, mengecek dan memastikan hasil penelitian benar atau salah. Kriteria kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikan dengan pembimbing.

4. Pengujian Kepastian (*confirmability*)

Kepastian berawal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Penelitian dikatakan objektivitas apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji kepastian (*confirmability*) adalah menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada. Dalam penelitian ini pengujian hasil penelitian dilakukan dengan disepakati banyak orang melalui seminar hasil dan pengujian skripsi (komprehensif). Pada kedua tahap ini derajat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya (Sugiyono, 2017:83).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Program GaDIS berdasarkan pasal 6 Perbup Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017, namun dari keenam prinsip tersebut, prinsip berkelanjutan belum dapat terlaksana dengan baik sebab ada beberapa unit usaha yang dalam pelaksanaannya vakum karena sulitnya melakukan pemasaran produk dan bahkan terdapat unit usaha yang hampir mati karena mengalami banyak kerugian dalam pengelolaan usahanya. Inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pesawaran juga telah sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung sebuah inovasi. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- a) **Aspek Keunggulan Relatif**, inovasi Program GaDIS merupakan inovasi satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung untuk mengentaskan kemiskinan di desa dengan cara memberikan dana bantuan berupa modal usaha Rp 100 juta kepada masyarakat desa.
- b) **Kompatibilitas**, Implementasi program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi telah sesuai dengan konsistensi nilai-nilai yang berlaku yang mengacu pada Perbup Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 serta telah

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya di kedua desa ini.

- c) **Kerumitan**, tingkat kerumitan dalam mengimplementasikan Program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi cukup tinggi dalam hal administrasi. Selain dalam hal administrasi, sulitnya mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa pun menjadi kerumitan tersendiri dalam mengimplementasikan program ini.
 - d) **Kemampuan diujicobakan**, inovasi Program GaDIS di Kabupaten Pesawaran mulai diimplementasikan pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2021 (5 tahun).
 - e) **Kemampuan diamati**, inovasi program GaDIS dalam pelaksanaannya di Desa Hanura dan Desa Sidodadi tidak lepas dari pengawasan dan pendampingan dari pihak Dinas PMD Pesawaran, Pemerintah Desa, BUMDes, camat dan pendamping desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi program GaDIS di Desa Hanura dan Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan, antara lain :
- 1) Faktor Pendukung :
 - a) Koordinasi antara Pemerintah Daerah, *stakeholder* dan masyarakat berjalan dengan baik.
 - b) Inovasi didukung oleh adanya kebebasan berekspresi menjadi jalan berinovasi
 - c) Adanya dukungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap Program GaDIS
 - d) Terdapat alokasi anggaran mendukung terlaksananya inovasi

- 2) Faktor Penghambat :
 - a) Administrasi & SOP per unit usaha di Desa Hanura dan Desa Sidodadi belum ada
 - b) Manajemen usaha yang buruk.
 - c) Keengganan pihak BUMDes dan Aparatur Desa dalam menghentikan unit usaha yang vakum dan merugi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis menyatakan bahwa inovasi ini telah baik secara konsep inovasi, namun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, maka peneliti mengemukakan saran untuk perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

1. Perlunya diberikan pembinaan administrasi agar pengelolaan setiap unit usaha menjadi profesional dan terarah sehingga diketahui bagaimana pergerakan pengembangan usaha, permodalan serta profit yang diperoleh, terutama berkaitan dengan :
 - a) Rencana Bisnis;
 - b) Standar Operasional Prosedur (SOP) unit usaha
 - c) Laporan Semesteran usaha; dan
 - d) Laporan Akhir Tahun usaha.

Selain itu, BUMDes juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan untuk mendukung pengetahuan managerial, peningkatan kapasitas kuantitas dan

kualitas produksi, akses permodalan, referensi jejaring pemasaran, pengalaman dan *success story* wirausahawan sukses, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha.

2. Perlu dibentuk sistem pemasaran terintegrasi BUMDes di Desa Hanura dan Sidodadi Pesawaran, melalui *E-commerce* seperti pasar virtual maupun promosi melalui media sosial pada umumnya; penyelenggaraan pasar rakyat secara berkala di lokasi-lokasi strategis untuk mempromosikan hasil-hasil usaha desa; serta membuka kerjasama dengan pengelola wisata, gerai makanan dan pengelola swalayan atau sejenisnya.
3. Perlu pengambilan keputusan yang cepat dari pihak aparatur desa serta BUMDes untuk segera menutup unit kegiatan usaha yang vakum dan mengalihkan dananya kepada unit usaha yang lain atau untuk membuka unit usaha baru.

DAFTAR PUSTAKA

- **Jurnal**

- Mariana, Dede. 2010. Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *Journal of Governance*, Vol. 1, No. 1. Diunduh pada <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/download/702/588>. 04 Maret 2019
- Sururi, Ahmad. 2017. Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya *Good Public Policy Governance*. *Journal of Spirit Public*, Vol. 12, No. 2. Diunduh pada <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/16236>. 04 Maret 2019
- Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. *Journal of STIA-LAN*. Diunduh pada https://www.researchgate.net/publication/328202667_INOVASI_DI_SEKTOR_PUBLIK. 25 Oktober 2018
- Vries, Hanna de, etc. 2015. Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda. The Netherlands: Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam. *Journal of Public Administrations*, Vol. 94, No.1. Diunduh pada : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/padm.12209>. 04 Maret 2019

- **Skripsi**

- Angraeni, Ria. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) (Studi Komparatif pada Tiyuh Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Lampung : Tesis Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
- Aprilia, Misna Andri. 2015. *Implementasi Program Bus Sekolah Gratis di Kota Metro*. Lampung : Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.
- Putri, Lusy Dian. 2016. *Inovasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengatasi Kekeringan (Studi tentang Program Pembangunan 1000 Embung Tahun 2013)*. Malang : Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumoharbo, Yulita Ika. 2016. *Inovasi Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015)* Lampung : Skripsi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.

- **Buku**

Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah : Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Maleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Noor, Dr. Iwan. 2017. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang : UB Press.

Nurcholish, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.

Sinaga, Obsatar. 2010. *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik : Implementasi kerjasama Internasional*. Bandung : Lepsindo.

Sumanjoyo S., dan Hermawan, Dedy. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Deepublish (Diakses melalui : <https://books.google.co.id/books?id=wEtuDwAAQBAJ&lpg=PA38&ots=KuWmdjR4RN&dq=faktor%20penghambat%20inovasi%20menurut%20albury&hl=id&pg=PR5#v=onepage&q=faktor%20penghambat%20inovasi%20menurut%20albury&f=false>. Pada 15 September 2018).

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syaukani, Gaffar dan Rasyid. 2010. *Otonomi Daerah : Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Yogyakarta : Rajawali Press.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

_____. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Mahardika

_____. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Bandung : Fokus Media

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran.

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pesawaran 2016-2021.

- **Internet**

<http://bappenas.go.id/download.php?id=8974-indeks-pembangunan>. Diakses pada 20 Agustus 2018

<https://www.radarlamsel.com/dendi-siapkan-bumdes-award/>. Diakses pada 22 Agustus 2018

<https://www.radarlamsel.com/bupati-dendi-luncurkan-program-gadis/>. Diakses pada 22 Agustus 2018

<https://www.badungkab.go.id/index.php/baca-berita/1218/Desa-Mengwi-Duta-Kabupaten-Badung-dalam-Lomba-Desa-Tingkat-Provinsi-Bali>. Diakses pada 09 September 2018.

<http://news.metrotvnews.com/politik/4KZOAEEN-fadli-zon-kritik-strategi-pembangunan-pemerintah-selama-2017>. Diakses pada 10 September 2018.

<http://www.unpan.org/innovme>. Diakses pada 23 Agustus 2018.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/102/137>. Diakses pada 11 September 2018.

<https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/E-Library%20Archives/2005%20Innovations%20in%20the%20Public%20Sector%20Compendium%20of%20Best%20Practices.pdf>. Diakses pada 11 September 2018.